

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan perubahan oleh struktur kegiatan ekonomi (Sukirno, 2010:423). Dalam pembangunan ekonomi ahli ekonomitidak hanya tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan rasional riil,tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi ,misalnya merombak sektor pertanian yang trasional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pendapatan.

Orientasi pembangunan saat ini dan beberapa tahun silam selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap negara berlomba-lomba meningkatkan roda perekonomiannya demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, hal ini telah banyak dikritik oleh sebagian ekonom dan ahli lingkungan. Karena pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagian besar akan mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan, sehingga perlu diperhatikan pula pada pemerataan dan keberlanjutan yang merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri.

Salah satu indikator yang selalu dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel ini dapat mudah diukur secara kuantitatif. Ekonomi dikatakan tumbuh jika terdapat kenaikan pendapatan (total maupun individu) sebagai akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto dengan mengabaikan kenaikan yang terjadi pada jumlah penduduk, tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak, apakah ketimpangan ekonomi (antar wilayah, masyarakat, dan antar sektor) menurun (Murdiono, 2014).

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah perlu mengenal sumber

daya yang ada didaerah tersebut,perlu diketahui sumber daya potensial apa yang ada didaerah tersebut sehingga dapat memaksimalkan tujuan pembangunan.Pemerintah daerah dituntut mengenali potensi yang dimiliki daerahnya karena menurut (Blakely:1994) dalam (Kuncoro,2010:25) pembangunan yang berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik potensial dapat menciptakan peluang pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi baru berbasis lokal.

Hal terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah (Denny Iswanto, 2015). Pemerintah telah mendorong ke setiap daerah agar mampu mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya sebagai sumber pendapatannya. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah sumberdaya alam tetapi kurang dalam sumberdaya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumberdaya alam tetapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas dan perbedaan infrastruktur. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah dapat terjadi.

Dalam setiap pembangunan daerah pasti akan timbul suatu masalah, dalam konteks pembangunan daerah maka ketimpangan antar daerah merupakan masalah yang selalu timbul dalam proses pembangunan. Ketimpangan yang lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Hal ini dianggap wajar terjadi karena terdapat perbedaan kepemilikan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur dari setiap daerah. Ketimpangan ekonomi yang sering

dijadikan indikator adalah perbedaan pendapatan perkapita. Pada awal proses pembangunan, pemerintah akan dihadapkan dengan *trade off* antara mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pemerataan distribusi pendapatan. Kuznet telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi, pasti akan terjadi ketimpangan yang tinggi dan berangsur membaik pada tahap selanjutnya. Hipotesis dikenal dengan hipotesis “U-Terbalik” Kuznet, sesuai dengan perubahan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien gini dan PDRB Perkapita yang akan terlihat seperti huruf “U-Terbalik”. Kuznet berkeyakinan distribusi pendapatan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan dengan padukuhan paling banyak adalah Tempel dengan 98 padukuhan, sedangkan kecamatan dengan padukuhan terkecil atau sedikit adalah Turi dengan 54 padukuhan, Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan dengan luas 4.799 ha, dan yang paling sempit atau kecil adalah Berbah dengan luas 2.299 ha, Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Tempel 8 desa, sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok dengan hanya 3 desa.

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Sleman Kabupaten dalam bidang usaha yang sangat bagus, terlihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016 (Persen)**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2014	2015	2016
1Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4.76	1.80	1.12
2Pertambangan dan Penggalian	1.01	0.17	0.43
3Industri Pengolahan	2.06	1.96	4.42
4Pengadaan Listrik dan Gas	3.62	1.46	15.27
5Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	4.02	3.02	2.40
6Konstruksi	5.64	4.44	4.77
7Perdagangan Besar dan Eceran	6.45	6.43	6.26

8Transportasi dan Pergudangan	5.40	3.91	7.39
9Penyediaan dan Makan	6.02	6.07	5.98
10Informasi dan Komunikasi	7.25	5.48	8.19
11Jasa Keuangan dan Asuransi	9.02	8.65	5.27
12 Real estate	8.37	6.62	5.32
13 Jasa perusahaan	9.03	7.13	3.55
14 Administrasi Pemerintahan	6.60	5.20	5.89
15 Jasa Pendidikan	8.57	7.88	3.98
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.01	7.65	4.47
17 Jasa lainnya	5.80	8.19	5.24
PDRB	100.0	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sleman Dalam Angka 2016.

Berdasarkan tabel 1.1Jika dilihat kurun waktu tahun 2012-2016 sektor jasa keuangan dan asuransi mempunyai kontribusi terbesar terhadap terbentuknya PDRB kabupaten sleman dengan rata-rata kontribusi pertahun 7,954 persen,dan yang paling kecil adalah pertambangan dan penggalian dengan rata-rata 1,078 persen .pada tahun 2016 laju pertumbuhan sektoral paling tinggi adalah pengadaan listrik dan gas,terlihat dari tahun 2015 sebesar 1,46 persen ke tahun 2016 sebesar 15,27 persen.dan penurunan paling dratis terdapat pasa sektoral jasa perusahaan,dari tahun 2015 sebesar 7,13 persen ke tahun 2016 sebesar 3,55 persen.

Laju pertumbuhan PDRB tidak serta merta menjadi patokan utama dalam melihat kesenjangan daerah, melainkan satu dari beberapa indikator yang bisa digunakan oleh peneliti dalam melakukan penjelasan tentang kesenjangan daerah antar sektor. Dengan kepemilikan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur sangat mempengaruhi PDRB di Kabupaten Sleman. Indikator lain yang bisa digunakan adalah kontribusi setiap sektor di Kabupaten Sleman.

**Tabel 1.2Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016**

Lapangan Usaha	Tahun		
	2014	2015	2016
1Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.33	8.36	8.06
2Pertambangan dan Penggalian	0.45	0.44	0.41

3Industri Pengolahan	13.95	13.43	13.36
4Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.10
5Pengadaan Air, Pengolahan Sampah	0.05	0.05	0.05
6Konstruksi	10.89	10.85	10.71
7Perdagangan Besar dan Eceran	7.64	7.61	7.79
8Transportasi dan Pergudangan	7.00	7.03	7.28
9Penyediaan dan Makan	9.98	10.20	10.28
10Informasi dan Komunikasi	8.45	8.06	8.01
11Jasa Keuangan dan Asuransi	3.21	3.30	3.26
12 Real Estate	7.71	7.76	7.90
13 Jasa Perusahaan	1.71	1.71	1.67
14 Administrasi Pemerintahan	6.54	6.65	6.81
15 Jasa Pendidikan	9.52	9.89	9.67
16 Jasa Pendidikan dan Kegiatan Sosial	2.27	2.34	2.35
17 Jasa lainnya	2.20	2.22	2.28
PDRB	100.00	100.00	100.00

(Sumber: Kabupaten Sleman dalam Angka 2016 (diolah))

Di lihat dari tabel, rata-rata kontribusi sektoral paling tinggi adalah industri pengolahan sebesar 13,76 persen, kedua adalah kontruksi sebesar 10,936 persen, dan ketiga adalah penyediaan dan makanan sebesar 10,008 persen. sedangkan kontribusi paling rendah adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 0,094 persen dan pengadaan air sebesar 0,05 persen.

Berangkat dari fenomena antar sektor tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat mengidentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Sleman. Maka peneliti mengambil judul “*Analisis potensi sektor ekonomi unggulan Kabupaten Sleman*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul antara lain:

1. Bagaimana sektor ekonomi unggulan di kabupaten sleman?
2. Bagaimana sektor ekonomi basis di kabupaten sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis setiap sektor di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis laju pertumbuhan setiap sektor di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah (BAPPEDA) yang terkait dengan pengembangan potensi di Kabupaten Sleman guna peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pertumbuhan.